

# Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara

Sylvia Yazid<sup>1</sup> dan Lie, Liliana Dea Jovita<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, s\_yazid@unpar.ac.id

<sup>2</sup>Magister Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, jovitaliliana@gmail.com

## Pendahuluan

Tahun 2020 menjadi tahun di mana seluruh dunia dihadapkan pada situasi yang belum pernah dialami sebelumnya, bahkan cenderung belum diantisipasi. Beberapa bulan memasuki tahun ini, semakin disadari bahwa kondisi ini bukan sesuatu yang sifatnya sementara, yang akan berakhir dalam beberapa bulan dan setelah itu seluruh sendi kehidupan di seluruh dunia akan kembali seperti semula. Pandemi yang disebabkan oleh penyebaran virus Covid-19 ini nampaknya masih akan menjadi permasalahan dunia untuk beberapa waktu ke depan.

Berbagai upaya dilakukan dan sebagian besar masih berfokus pada mengatasi dampak saat ini serta menekan kecepatan penyebaran atau yang dikenal sebagai *flattening the curve*. Beberapa negara telah mengumumkan keberhasilannya, namun sebagian besar masih berjuang keras. Sehingga pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi global<sup>1</sup>, yang merujuk pada penyebaran penyakit yang dianggap dapat menginfeksi dari orang ke orang dengan mudah dan cepat, serta terjadi secara berkelanjutan, di berbagai wilayah.

Melihat kecenderungan perkembangan penanganan hingga saat ini, telah mulai muncul prediksi bahwa kondisi ini akan berlangsung cukup lama. Ada yang menggunakan hitungan bulan, bahkan ada yang menggunakan hitungan

tahun. Sehingga, kondisi darurat yang tadinya dipandang sebagai sementara, akan segera menjadi keniscayaan atau normal yang baru atau *the new normal*. Walaupun saat ini hampir seluruh perhatian tertuju pada penanganan dampak, perlu mulai dipikirkan *the new normal* seperti apa yang perlu diantisipasi. Kompleksitas permasalahan semakin tinggi karena banyaknya aspek-aspek yang masih sangat dinamis dan belum dapat diprediksi. Data yang tersedia juga sangat terbatas dan terus berubah. Oleh karenanya, pembahasan tentang *the new normal* perlu dilakukan secara spesifik tentang bidang-bidang tertentu, dengan prioritas pada bidang yang paling terdampak atau bidang yang berpotensi memunculkan masalah-masalah lanjutan yang mungkin saja lebih besar.

Tulisan ini akan berfokus pada isu mobilitas manusia, isu yang pada *the old normal* pun telah merupakan isu global yang kompleks, yang melibatkan begitu banyak aktor dan penyelesaiannya membutuhkan upaya bersama yang seringkali sulit untuk diupayakan. Hampir seluruh negara di dunia menghadapi permasalahan terkait mobilitas manusia namun jumlah negara yang memiliki komitmen untuk berkontribusi terhadap penyelesaian masih sangat terbatas, bahkan cenderung berkurang. Bahkan upaya global terakhir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, the Global Compact for Migration yang bersifat *non-legally binding* pun, tidak mendapatkan dukungan penuh dari Amerika

---

<sup>1</sup> Jamie Ducharme, "World Health Organization Declares COVID-19 a 'Pandemic.' Here's What That

Means", Time Online, 11 Maret 2020 [Diakses dari <https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/> pada 19 April 2020].

Serikat, Australia, dan negara-negara lainnya di Eropa.

Mobilitas manusia merupakan salah satu faktor yang turut mempercepat penyebaran virus Covid-19. Di Cina, sampai dengan 23 Januari 2020 – sebelum Wuhan menetapkan status *lockdown* – sebagian besar laporan mengenai kasus-kasus awal Covid-19 berasal dari Provinsi Hubei (81% dari keseluruhan kasus saat itu), sementara mayoritas dari kasus yang dilaporkan terjadi di luar Kota Wuhan umumnya memiliki sejarah perjalanan dari kota tersebut.<sup>2</sup> Adanya waktu yang dibutuhkan untuk gejala dapat muncul dan teridentifikasi sebagai orang terinfeksi Covid-19 memberikan kesempatan untuk virus tersebut dapat bertransmisi dari satu orang ke banyak orang lainnya di lokasi-lokasi berbeda. Akibatnya, virus ini pun menyebar dengan cepat ke berbagai negara lainnya.

Oleh karenanya, pembahasan tentang mobilitas manusia dan pandemi ini menjadi menarik karena di satu sisi mobilitas manusia telah menjadi salah satu pemicu utama dari terjadinya pandemi ini. Sementara, di sisi lain, setelah virus menyebar sangat luas, dampak segera yang sangat dapat dilihat adalah pertama adanya kecenderungan *reversed mobility*, di mana terjadi arus balik para migran temporer ke wilayah-wilayah asal mereka dan kedua, *mobility limitation* berupa pembatasan atau penghentian mobilitas yang kemudian berdampak terhadap bidang-bidang lain seperti transportasi, pariwisata, dan tentu saja ekonomi secara keseluruhan. Dengan kata lain, jika pada awalnya mobilitas manusia lah yang memicu pandemi, lingkaran pengaruh yang terjadi segera menyebabkan pandemi akhirnya mengubah pola mobilitas manusia itu sendiri.

Sebagai langkah antisipasi untuk mencegah dan memperlambat tren penyebaran Covid-19 tersebut, berdasarkan laporan WHO per tanggal 11 April 2020, sebanyak 167 negara telah menerapkan langkah-langkah tambahan melalui berbagai kebijakan, yang berfokus untuk membatasi mobilitas masyarakat.<sup>3</sup> Kebijakan-kebijakan yang dimaksud meliputi pembatasan masuknya orang-orang dari negara-negara terdampak Covid-19, penangguhan penerbangan, pembatasan visa, penutupan perbatasan, hingga karantina. Penerapan berbagai kebijakan tersebut tentu saja dapat mengganggu lalu lintas mobilitas manusia di tingkat regional maupun internasional. Sementara itu, di level domestik sendiri, pemerintah di berbagai negara juga mulai menerapkan kebijakan *lockdown* yang juga berfokus untuk membatasi ruang gerak masyarakat yang ada. Pertanyaan penting yang kemudian muncul adalah kebijakan pembatasan mobilitas seperti apakah yang dikeluarkan dan dampak apa yang telah dan mungkin muncul akibat dari pembatasan tersebut.

### **Mobilitas Manusia di Asia Tenggara**

Mobilitas manusia merupakan salah satu topik sentral di era globalisasi ini. Kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi, serta transportasi, membuat mobilitas manusia menjadi sangat mudah dan sulit untuk dibendung. Masyarakat kemudian berbondong-bondong untuk melakukan mobilisasi dengan berbagai tujuan, mulai dari aktivitas pariwisata, mencari pekerjaan, menempuh pendidikan, hingga untuk mencari tempat tinggal baru yang dirasa lebih aman. Mobilitas dapat terjadi baik di tingkat lokal, regional maupun internasional.

Di kawasan Asia Tenggara, terdapat beberapa isu besar terkait mobilitas manusia

---

<sup>2</sup> M.U.G. Kraemer et al., “The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China”, Science 10.1126/science.abb4218 (25 Maret 2020), hlm 1.

<sup>3</sup> “Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 88”, WHO, 17 April 2020.

dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertama adalah isu tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang mana salah satu unsur penting yang ditekankan dalam MEA adalah adanya aliran bebas tenaga kerja terampil antar-negara anggota ASEAN.<sup>4</sup> Dalam praktiknya, aliran pekerja migran di sektor domestik juga masih cukup dominan. Sementara isu kedua adalah isu tentang pergerakan pengungsi di kawasan Asia Tenggara, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan pengungsi Rohingya.<sup>5</sup>

Pola mobilitas masyarakat Asia Tenggara, khususnya terkait pekerja migran, dapat diamati sejak tahun 1970-1980an.<sup>6</sup> Perkembangan industri di Timur Tengah pada periode tersebut menarik warga dari Indonesia, Filipina dan Thailand untuk bekerja di sana. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Singapura dan Malaysia tahun 1970an dan perkembangan industri di Thailand tahun 1990an membuat ketiga negara ASEAN tersebut menjadi destinasi dari pekerja migran.

Dari pertengahan 1990-an, pola mobilitas kemudian bergeser dengan bertambahnya migrasi intra-ASEAN. Terdapat peningkatan pekerja migran sebesar tiga kali lipat, dari 2,1 juta pada tahun 1995 menjadi 6,9 juta pada tahun 2015.<sup>7</sup> Berdasarkan data stok migrasi bilateral dari PBB, pola migrasi intra-ASEAN dari tahun 1995-2015 terbagi ke dalam beberapa rute utama, yaitu pekerja migran dari Kamboja, Laos, dan Myanmar menuju Thailand (*Greater Mekong Subregion/GMS*), migrasi dari Indonesia ke Malaysia, serta rute Malaysia –

Singapura.<sup>8</sup> Sementara itu, mayoritas pekerja migran Filipina dan Vietnam bekerja di luar ASEAN.

Pola migrasi intra-ASEAN tahun 1995-2015 sebagian besar berada dalam lingkup kerja sama bilateral antara *home country* dan *host country*. Inisiatif dari seluruh negara ASEAN baru terlihat dengan pembentukan MEA pada Desember 2015. Pola migrasi pun turut berubah. Sebelumnya, mayoritas pekerja migran intra-ASEAN didominasi oleh pekerja di sektor agrikultur, industri, dan *domestic services*. Dengan adanya MEA, maka mobilitas pekerja juga semakin difokuskan kepada pekerja yang memiliki keterampilan tinggi.

Terkait mobilitas *forced migrant*, kawasan Asia Tenggara telah menghadapi setidaknya dua krisis pengungsi besar, yaitu krisis pengungsi Indocina pada tahun 1970an, dan krisis pengungsi beberapa tahun belakangan ini yang melibatkan etnis Rohingya. Puncak dari pergerakan pengungsi di akhir tahun 1970an terjadi ketika rezim Indocina baru mengambil kendali atas orang-orang Vietnam, Khmer dan Laos.<sup>9</sup> Thailand merupakan negara yang paling terdampak akibat besarnya arus pengungsi yang masuk. Negara Asia Tenggara lain yang juga menjadi tujuan pengungsi pada saat itu adalah Malaysia, Indonesia dan Filipina.<sup>10</sup>

Sementara itu, dalam satu dekade terakhir, mayoritas pengungsi yang bergerak di kawasan Asia Tenggara didominasi oleh pengungsi Rohingya. Penindasan etnis Rohingya

---

<sup>4</sup> Aiko Kikkawa dan Eric B. Suan, "Trends and patterns in intra-ASEAN migration", dalam *Skilled Labor Mobility and Migration: Challenges and Opportunities for the ASEAN Economic Community*, ed. Elisabetta Gentile, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019), hlm 4.

<sup>5</sup> "Refugee Movements in South-East Asia: 2018 – June 2019", UNHCR, (2019), hlm 2.

<sup>6</sup> Amarjit Kaur, "Labour migration trends and policy challenges in Southeast Asia", *Policy and Society* 29 (2010), hlm 386.

<sup>7</sup> Aiko Kikkawa dan Eric B. Suan., *op.Cit.*, hlm 6.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Caroline Lavoie dan Raymond B. Knock, "The ASEAN and International Response to the Southeast Asian Refugee Crisis: A Canadian Perspective", *Southeast Asian Journal of Social Science, Vol. 18, No. 1* (1990), hlm 44.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 45-46.

di Myanmar membuat angka pengungsi semakin bertambah. Sebagian besar pengungsi Rohingya menjadikan Bangladesh sebagai tujuan utama.<sup>11</sup> Sebagian kecil di antaranya kemudian kembali melakukan perpindahan dari Bangladesh menuju negara-negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand dan Indonesia.<sup>12</sup>

### **Kebijakan Pembatasan Sosial**

Adanya pandemi Covid-19 membuat mobilitas manusia di kawasan Asia Tenggara menjadi sangat terbatas. Terlebih, dengan jumlah penderita Covid-19 yang semakin meningkat di kawasan tersebut, diprediksi bahwa kawasan Asia Tenggara dapat menjadi *hotspot* Covid-19 selanjutnya. Sebagai langkah antisipasi, berbagai kebijakan telah diterapkan, termasuk kebijakan pembatasan interaksi, pembatasan gerak, dan penghentian operasional moda transportasi darat, laut, dan udara. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai upaya penanganan Covid-19 di Asia Tenggara, dengan mengambil contoh dari empat negara ASEAN dengan kasus Covid-19 terbanyak saat ini.

#### *Indonesia*

Terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, mulai dari penutupan perbatasan dan larangan masuk, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hingga larangan mudik.<sup>13</sup> PSBB yang diterapkan oleh Indonesia meliputi himbuan kegiatan belajar, bekerja dan beribadah yang dilakukan dari rumah, pembatasan aktivitas di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, serta pembatasan hingga penghentian

moda transportasi. Penerapan kebijakan ini dapat menekan angka penyebaran Covid-19 apabila dijalankan dengan benar. Namun, tidak (atau belum) adanya sanksi tegas bagi mereka yang melanggar membuat masyarakat menjadi tidak taat dalam mematuhi peraturan yang ada. Akibatnya, kebijakan yang ada dipandang kurang efektif.

#### *Malaysia*

Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, Pemerintah Malaysia juga menerapkan kontrol perbatasan, serta kebijakan pembatasan sosial yang disebut *movement control order* (MCO).<sup>14</sup> Penerapan kebijakan di Malaysia dapat dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan Indonesia dikarenakan adanya sanksi berupa denda bagi mereka yang melanggar.

Namun, pembuatan kebijakan tersebut cenderung lebih mengutamakan kepentingan warga Malaysia dan mengesampingkan kepentingan pekerja migran serta pengungsi yang datang ke Malaysia. Isu kebijakan terhadap pekerja migran menjadi krusial ketika berbicara tentang Malaysia karena hingga saat ini Malaysia masih merupakan salah satu negara tujuan utama pekerja migran di Asia Tenggara, baik yang berdokumen maupun tidak berdokumen. Terkait hal tersebut, pada 22 April 2020, Departemen Imigrasi menanggukkan semua operasi pelanggaran hukum selama masa MCO berlangsung<sup>15</sup> meski masih terdapat permasalahan lainnya yang perlu diperhatikan terkait pekerja migran. Penerapan kebijakan MCO membuat pekerja migran di Malaysia menjadi terancam, baik oleh ancaman ekonomi

---

<sup>11</sup> “Refugee Movements in South-East Asia: 2018 – June 2019”, UNHCR, (2019), hlm 4.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> “National Responses to COVID-19 in Southeast Asia”, Center for Strategic and International Studies, 23 April 2020, [diakses dari <https://www.csis.org/programs/southeast-asia->

[program/southeast-asia-covid-19-tracker-0](https://www.csis.org/programs/southeast-asia-covid-19-tracker-0) pada 23 April 2020].

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> “MCO: Immigration halts operations against illegal immigrants”, Malaymail, 22 April 2020, [diakses dari <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/04/22/mco-immigration-halts-operations-against-illegal-immigrants/1859235> pada 24 April 2020].

akibat pemutusan hubungan kerja (terutama bagi pekerja harian yang tidak dapat bekerja karena MCO), maupun ancaman kesehatan karena akses yang terbatas terhadap tes dan fasilitas kesehatan.<sup>16</sup>

Tidak hanya pekerja migran, Malaysia juga merupakan salah satu negara tujuan dari pengungsi Rohingya. Ketakutan akan penyebaran Covid-19 membuat pemerintah Malaysia mencegah kapal yang diperkirakan berisi 200 pengungsi Rohingya untuk memasuki perairan Malaysia.<sup>17</sup> Keputusan pemerintah Malaysia tersebut mendapat kritikan dari Human Rights International dan Amnesty International.

### *Singapura*

Singapura juga telah melakukan penutupan perbatasan bagi pengunjung jangka pendek, serta pembatasan sosial yang disebut *circuit breaker* hingga 1 Juni 2020. Istilah *circuit breaker* mengacu pada imbauan untuk tetap di rumah guna memutus rantai transmisi Covid-19 di masyarakat, yang meliputi imbauan untuk tetap tinggal di rumah, kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan secara *online*, akses terkontrol di area yang rentan terhadap keramaian seperti pasar, penutupan sebagian besar tempat kerja, serta penerapan aturan-aturan keamanan tambahan di tempat kerja yang masih

beroperasi.<sup>18</sup> Sama seperti Malaysia, pemerintah Singapura juga telah memberlakukan denda bagi para pelanggar sehingga penerapan kebijakan tersebut menjadi lebih efektif.

Sementara itu, pemerintah Singapura juga dianggap masih mengesampingkan pekerja migran yang ada. Hal ini terlihat dari merebaknya penyebaran virus di asrama pekerja migran yang penuh sesak dalam beberapa minggu terakhir.<sup>19</sup>

### *Filipina*

Sama seperti ketiga negara yang disebutkan sebelumnya, Filipina juga telah menetapkan adanya pembatalan penerbangan domestik dan internasional, serta pembatasan sosial hingga akhir April 2020. Penerapan kebijakan pembatasan sosial dipusatkan di Pulau Luzon, yaitu pulau dengan populasi terbanyak dan merupakan pusat kegiatan ekonomi di Filipina.<sup>20</sup> Tidak jauh berbeda, pembatasan sosial yang dimaksud meliputi imbauan untuk tetap tinggal di rumah dan hanya bepergian untuk membeli kebutuhan barang-barang pokok, serta keperluan medis. Hanya saja, penerapan kebijakan ini sempat disertai dengan adanya ancaman dari Presiden Duterte yang akan memberlakukan darurat militer apabila orang-orang tidak mematuhi peraturan tersebut.<sup>21</sup> Keputusan Presiden Duterte ini dipandang

<sup>16</sup> Guna Subramaniam, "Impact of Covid-19 on Migrant Workers in SE Asia Countries of Focus", Institute for Human Rights and Business, 9 April 2020, [diakses dari <https://www.ihrb.org/focus-areas/migrant-workers/covid-19-migrant-workers-south-east-asia-update-3> pada 23 April 2020].

<sup>17</sup> "Malaysia: Allow Rohingya Refugees Ashore, Covid-19 No Basis for Pushing Back Boats", Human Rights Watch, 18 April 2020, [diakses dari <https://www.hrw.org/news/2020/04/18/malaysia-allow-rohingya-refugees-ashore> pada 24 April 2020].

<sup>18</sup> "Circuit Breaker extension and tighter measures: What you need to know", [diakses dari <https://www.gov.sg/article/circuit-breaker-extension-and-tighter-measures-what-you-need-to-know> pada 23 April 2020].

<sup>19</sup> Rebecca Ratcliffe, "'We're in a prison': Singapore's migrant workers suffer as Covid-19 surges back", The Guardian, 23 April 2020, [diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/23/singapore-million-migrant-workers-suffer-as-covid-19-surges-back> pada 24 April 2020].

<sup>20</sup> Andreo Calozzo, "Philippines Extends Lockdown of Main Island Until End of April", Bloomberg, 7 April 2020, [diakses dari <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-06/philippine-president-likely-to-extend-lockdown-to-april-30> pada 23 April 2020].

<sup>21</sup> Alan Robles, "Coronavirus: fears grow of 'martial-law like' lockdown in the Philippines", South China Morning Post, 20 April 2020, [diakses dari <https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3080765/coronavirus-fears-grow-martial-law-lockdown-philippines> pada 23 April 2020].

berlebihan, dan justru akan menambah kekhawatiran warga Filipina.

Selain upaya dari masing-masing negara, upaya bersama di tingkat ASEAN juga terlihat dengan diadakannya pertemuan virtual KTT Khusus ASEAN Plus Tiga tentang Covid-19 pada 14 April 2020.<sup>22</sup> Dalam deklarasi final yang dihasilkan, terlihat bahwa rencana kerja sama di tingkat ASEAN lebih difokuskan pada kerja sama di sektor medis - seperti pertukaran informasi kesehatan, kerja sama penelitian dan pengembangan vaksin, hingga pemberian bantuan alat-alat medis – serta kerja sama di sektor ekonomi. KTT ini tidak menyinggung atau pun membahas kerja sama yang bisa dilakukan terkait pembatasan mobilitas yang diberlakukan masing-masing negara. Padahal, kebijakan pembatasan mobilitas tersebut dapat berpengaruh terhadap pergerakan masyarakat di Asia Tenggara, khususnya bagi pekerja migran dan pengungsi, yang selama ini mengandalkan kemudahan mobilitas yang ada.

### **Dampak terhadap Mobilitas Masyarakat Asia Tenggara**

Penutupan perbatasan dan pembatasan sosial yang telah diberlakukan oleh sejumlah negara di ASEAN dapat dipastikan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tulisan ini akan membahas secara khusus dampak yang dialami oleh dua elemen masyarakat yang paling rentan terhadap pemberlakuan kebijakan terkait Covid-19, yaitu pekerja migran dan pengungsi.

#### *Dampak Kebijakan terhadap Mobilitas Pekerja Migran di Asia Tenggara*

Adanya penerapan pembatasan sosial membuat sebagian besar pelaku industri harus

menutup sementara kegiatan produksinya. Ini menyebabkan para pekerja terpaksa dirumahkan, dengan ketidakpastian kapan atau apakah mereka akan bekerja kembali. Hal ini akan menjadi masalah besar bagi pekerja harian di sektor non-esensial, yang tidak dapat bekerja akibat adanya pembatasan sosial. Kebijakan yang dinilai lebih mementingkan warga negara daripada pekerja asing tersebut juga menuai polemik karena minimnya tes Covid-19 dan fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah untuk mereka. Sementara itu, pola mobilitas pekerja migran juga mengalami perubahan akibat kebijakan-kebijakan tersebut. Pekerja migran yang semula bekerja di negara lain kini kembali ke negara asalnya akibat penutupan tempat kerja. Inilah yang terjadi dengan Filipina, yang merupakan salah satu negara pemasok pekerja migran terbesar. Ribuan pekerja migran Filipina memutuskan untuk kembali, sehingga mengakibatkan remitansi yang diterima Filipina tahun ini diperkirakan menurun hingga 30%.<sup>23</sup>

#### *Dampak Kebijakan terhadap Mobilitas Pengungsi Rohingya di Asia Tenggara*

Isu lain yang menjadi perhatian adalah bagaimana dampak dari kebijakan pembatasan sosial ini berpengaruh terhadap mobilitas para pengungsi, dalam kasus Asia Tenggara adalah pengungsi Rohingya. Selama beberapa tahun terakhir, orang-orang Rohingya yang mengalami penindasan di Myanmar telah mencari perlindungan ke negara-negara lain, termasuk ke negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Indonesia.

Di tengah merebaknya wabah Covid-19, Amnesty International telah menerima laporan bahwa bahwa setidaknya terdapat tiga hingga lima kapal yang masing-masing diperkirakan mengangkut ratusan pengungsi Rohingya terlihat

---

<sup>22</sup> “Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”, ASEAN, 14 April 2020, [diakses dari <https://asean.org/declaration->

[special-asean-summit-coronavirus-disease-2019-covid-19/](https://asean.org/declaration-special-asean-summit-coronavirus-disease-2019-covid-19/) pada 22 April 2020].

<sup>23</sup> Alan Robles, Loc., Cit.

di pesisir Malaysia dan bagian selatan Thailand.<sup>24</sup> Adanya penolakan terhadap masuknya kapal-kapal tersebut membuat kekhawatiran baru bahwa pengungsi Rohingya akan terjebak di kapal di tengah lautan dan tidak dapat mencapai negara lain karena kontrol perbatasan yang semakin diperketat. Oleh sebab itu, baik UNHCR maupun IOM telah menegaskan bahwa dalam konteks pandemi sekali pun, hak prerogatif negara untuk mengatur masuknya orang asing ke wilayah mereka tidak dapat digunakan untuk menolak hak orang untuk mencari suaka.<sup>25</sup>

## Kesimpulan

Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya perubahan dalam pola mobilitas masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara. Sebagai upaya untuk *flattening the curve*, masyarakat kini diminta untuk beraktivitas dari rumah dan tidak melakukan perjalanan yang tidak diperlukan. Sejauh ini upaya tersebut masih dianggap sebagai upaya yang paling efektif. Adanya pembatasan sosial diharapkan dapat meminimalisir transmisi virus Covid-19 dari manusia ke manusia. Namun di sisi lain, penanganan yang lebih difokuskan pada warga negara masing-masing ini menjadikan pekerja migran dan pengungsi sebagai kelompok yang paling rentan. Pola mobilitas pekerja migran dan pengungsi pun mengalami perubahan. Akibat Covid-19, jumlah pekerja migran yang kembali ke negaranya semakin bertambah, sementara pengungsi semakin kesulitan untuk mendapatkan perlindungan suaka.

Belum adanya kepastian kapan pandemi ini berakhir juga menimbulkan kekhawatiran baru tentang *the new normal*. Sekalipun keadaan kembali normal pasca pandemi ini, keadaan normal yang baru tidak lagi sama dengan keadaan normal seperti sebelum pandemi terjadi. Banyak

perubahan yang pastinya akan dihadapi oleh masyarakat. Pembatasan sosial yang menyebabkan banyak usaha harus ditutup akan mengakibatkan bertambahnya pengangguran, sehingga ketika pandemi ini berakhir, bahkan sekarang pun, orang-orang yang membutuhkan pekerjaan telah meningkat jumlahnya.

Bila direfleksikan dari fenomena migrasi tenaga kerja di Asia Tenggara, mobilitas pekerja migran ke luar negeri umumnya didasari oleh faktor ekonomi dan menjadi solusi bagi negara dalam mengatasi masalah pengangguran. Dengan kondisi saat ini, dapat dikatakan permasalahan yang sebelumnya telah mulai ditemukan solusinya, nantinya akan kembali kepada kondisi sebelumnya bahkan bisa menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Apalagi jika mengingat ketika perbatasan mulai dibuka, masih dibutuhkan waktu agar mobilitas masyarakat kembali seperti keadaan normal, terlebih dengan adanya kekhawatiran akan adanya gelombang baru penularan Covid-19.

Hal-hal inilah yang akan menjadi tantangan baru bagi masyarakat Asia Tenggara, termasuk keberlanjutan masyarakat ekonomi ASEAN dan penanganan masalah pengungsi pasca-pandemi. Konektivitas ASEAN pasca pandemi harus diperkuat kembali, demikian juga dengan penyediaan lapangan kerja dan pembuatan kebijakan-kebijakan terkait pengungsi yang harus diperbarui. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya upaya-upaya dan kerja sama yang lebih konkret dari negara-negara ASEAN, terutama untuk mengantisipasi *the new normal* yang akan dihadapi masyarakat ASEAN nantinya. Besar kemungkinan, termasuk di antaranya upaya *restarting* berbagai upaya regional yang selama ini telah berjalan dengan

---

<sup>24</sup> "COVID-19: no excuse to sacrifice Rohingya lives at sea", Amnesty International, 17 April 2020, [diakses dari <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/covid-no>

excuse-sacrifice-lives-more-rohingya-see-safety-boat/ pada 22 April 2020].

<sup>25</sup> Ibid.

melakukan formulasi ulang platform kerjasama kawasan.

## Referensi

- Amnesty International. "COVID-19: no excuse to sacrifice Rohingya lives at sea." 17 April 2020 [Diakses dari <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/covid-no-excuse-sacrifice-lives-more-rohingya-seek-safety-boat/> pada 22 April 2020].
- ASEAN. "Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)." 14 April 2020 [Diakses dari <https://asean.org/declaration-special-asean-summit-coronavirus-disease-2019-covid-19/> pada 22 April 2020].
- Calonzo, Andreo. "Philippines Extends Lockdown of Main Island Until End of April." Bloomberg, 7 April 2020, [Diakses dari <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-06/philippine-president-likely-to-extend-lockdown-to-april-30> pada 23 April 2020].
- Center for Strategic and International Studies. "National Responses to COVID-19 in Southeast Asia." 23 April 2020 [Diakses dari <https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/southeast-asia-covid-19-tracker-0> pada 23 April 2020].
- "Circuit Breaker extension and tighter measures: What you need to know." [Diakses dari <https://www.gov.sg/article/circuit-breaker-extension-and-tighter-measures-what-you-need-to-know> pada 23 April 2020].
- Ducharme, Jamie. "World Health Organization Declares COVID-19 a 'Pandemic.' Here's What That Means." Time Online, 11 Maret 2020 [Diakses dari <https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/> pada 19 April 2020].
- Human Rights Watch. "Malaysia: Allow Rohingya Refugees Ashore, Covid-19 No Basis for Pushing Back Boats." 18 April 2020 [Diakses dari <https://www.hrw.org/news/2020/04/18/malaysia-allow-rohingya-refugees-ashore> pada 24 April 2020].
- Kaur, Amarjit. "Labour migration trends and policy challenges in Southeast Asia." *Policy and Society* 29 (2010): 385-397.
- Kikkawa, Aiko., dan Eric B. Suan. "Trends and patterns in intra-ASEAN migration." Dalam *Skilled Labor Mobility and Migration: Challenges and Opportunities for the ASEAN Economic Community*, ed. Elisabetta Gentile. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019.
- Kraemer, M.U.G., dkk. "The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China." *Science* 10.1126/science.abb4218 (25 Maret 2020).
- Lavoie, Caroline., dan Raymond B. Knock. "The ASEAN and International Response to the Southeast Asian Refugee Crisis: A Canadian Perspective". *Southeast Asian Journal of Social Science*, Vol. 18, No. 1 (1990): 43-65.

“MCO: Immigration halts operations against illegal immigrants.” Malaymail, 22 April 2020 [Diakses dari <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/04/22/mco-immigration-halts-operations-against-illegal-immigrants/1859235> pada 24 April 2020].

Ratcliffe, Rebecca. “‘We’re in a prison’: Singapore’s migrant workers suffer as Covid-19 surges back.” The Guardian, 23 April 2020 [Diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/23/singapore-million-migrant-workers-suffer-as-covid-19-surges-back> pada 24 April 2020].

Robles, Alan. “Coronavirus: fears grow of ‘martial-law like’ lockdown in the Philippines.” South China Morning Post, 20 April 2020 [Diakses dari <https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3080765/coronavirus-fears-grow-martial-law-lockdown-philippines> pada 23 April 2020].

Septiari, Dian. “ASEAN must not neglect migrant workers, refugees in COVID-19 response: Activists.” The Jakarta Post, 15 April 2020 [Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/04/15/asean-must-not-neglect-migrant-workers-refugees-in-covid-19-response-activists.html> pada 24 April 2020].

Subramaniam, Guna. “Impact of Covid-19 on Migrant Workers in SE Asia Countries of Focus.” Institute for Human Rights and Business, 9 April 2020, [diakses dari <https://www.ihrb.org/focus-areas/migrant-workers/covid-19-migrant-workers-south-east-asia-update-3> pada 23 April 2020].

UNHCR. “Refugee Movements in South-East Asia: 2018 – June 2019.”

WHO. “Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 88.” 17 April 2020.